

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan secara umum tren bencana alam di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir¹. Posisi Indonesia yang berada pada wilayah *Pacific ring of fire* atau disebut juga dengan sirkum Pasifik dan diapit oleh tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Indo Australian, Euroasia dan Lempeng Pasifik sehingga menyebabkan negara Indonesia menjadi negara rawan bencana.

Berbagai kejadian bencana alam yang melanda negara Indonesia beberapa tahun belakangan ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas. Berikut adalah tabel bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel 1.1
Data Bencana Alam di Indonesia

NO	Daftar Bencana	2015	2016	2017	2018
1	Banjir	525	824	979	679
2	Tanah Longsor	502	599	848	474
3	Gempa Bumi	26	15	23	27
4	Abrasi/ Pasang Gelombang	7	22	11	34
5	Tsunami	0	0	0	2
6	Letusan Gunung Api	10	7	6	52
7	Gempa dan Tsunami	0	0	0	2
Jumlah		1.070	1.467	1.876	1.270

Sumber: Dokumen Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam <https://bnpb.cloud/dibi/> tahun 2018

¹ Tuyodho, Deretan Bencana Alam Mematikan Yang Menerjang Indonesia Sepanjang Tahun 2018 (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46691586>), 2018, diakses tanggal 14 Mei Pukul 13.51 WIB

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata setiap tahunnya ada peningkatan intensitas bencana yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 menjadi tahun terbanyak menelan korban jiwa meninggal akibat bencana. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Humas BNPB melalui media *online* berikut ini:

“...dibandingkan tahun tahun sebelumnya terhitung dari tahun 2007, bencana alam pada tahun 2018 tak jauh beda dari tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2018 memiliki dampak yang ditimbulkan bencana alam sangat besar. Selain menelan korban jiwa yang banyak tetapi juga menimbulkan kerusakan yang signifikan dan berdampak besar terhadap perekonomian indonesia”²

Seperti yang diketahui selama tahun 2018 beberapa daerah di Indonesia dilanda bencana mulai dari bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami serta adanya kejadian tanah bergerak yang dikenal dengan istilah likuifaksi. Likuifaksi merupakan fenomena dimana tanah kehilangan kekuatannya akibat diguncang gempa sehingga mengakibatkan tanah tidak memiliki daya ikat³. Sehingga hal ini membuat banyaknya korban jiwa yang meninggal dan hilang serta menimbulkan kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh kejadian bencana tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

²Fitria, BNPB: Selama 2018 Ada 1999 Kejadian Bencana , (https://nasional.kompas.com/read/2018/10/25/22572321/bnpb-selama-2018-ada-1999-kejadian-bencana), 2018, diakses Tanggal 14 Maret 2019 Pukul 14.00 WIB

³Gibran, Begini Efek Fenomena Likuifaksi ‘Tanah Bergerak’ Usai Gempa, (https://news.detik.com/berita/4236365/begini-efek-fenomena-likuifaksi-tanah-bergerak-usai-gempa), 2018, diakses 14 Maret 2019 Pukul 12.00 WIB

Tabel 1.2
Bencana di Indonesia yang Menelan Korban Jiwa
Terbanyak Sepanjang Tahun 2018

NO	Daerah	Daftar Kejadian	Daftar Korban			Total (Jiwa)
			Luka-luka (Jiwa)	Tewas (Jiwa)	Hilang (Jiwa)	
1	Sleman	Longsor	-	7	13	20
2	Lombok	Gempa Bumi	1.584	56	-	1.640
3	Sulawesi Tengah	Gempa Bumi dan Tsunami	4.438	2.079	1.330	7.847
4	Banten	Tsunami	1.500	430	149	2.079

Sumber: Dokumen Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam <https://bnpb.cloud/dibi/tahun2018>

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa korban jiwa yang meninggal dan hilang banyak berasal dari bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah, termasuk akibat fenomena likuifaksi yang terjadi pada saat gempa bumi mengguncang Sulawesi kerusakan dan kerugian mencapai lebih dari Rp 13,82 triliun⁴. Oleh sebab itu disadari bahwa kerugian yang disebabkan oleh bencana alam sangat besar, bukan hanya menelan korban jiwa tetapi juga menimbulkan kerugian dan kerusakan fisik serta infrastruktur. Dan juga mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menilai bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyikapi bencana alam masih rendah serta dalam menghadapi bencana alam masih belum maksimal. Sehingga hal ini perlu dibenahi agar dapat mengurangi risiko bencana dan memperkecil kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Oleh sebab itu penanggulangan bencana dimasa yang akan datang perlu dilakukan dari sekarang

⁴Ibid

dan menjadi perhatian dari berbagai pihak terkait, bukan hanya pemerintah saja tetapi juga dukungan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

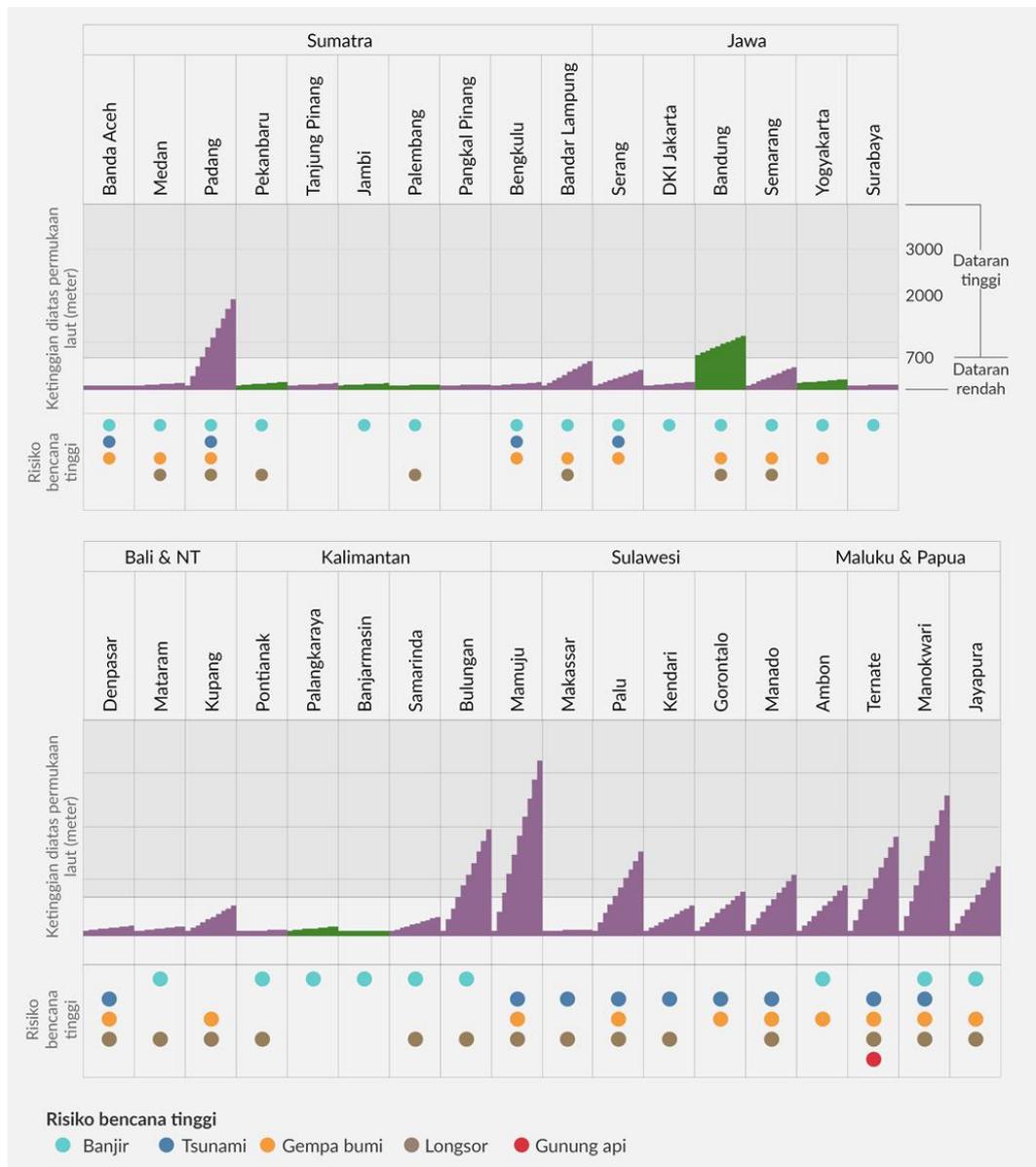
Saat ini Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi landasan hukum bagi setiap aktivitas pengurangan risiko bencana di Indonesia, dimana pada peraturan tersebut tertera bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif. Serta melalui peraturan ini dilakukan juga perubahan terhadap lembaga-lembaga yang menangani penanggulangan bencana baik ditingkat nasional maupun daerah. Kedua lembaga ini saling berkoordinasi terkait penanggulangan bencana baik tingkat nasional maupun yang terjadi ditingkat daerah.

Provinsi Sumatera Barat yang terletak di wilayah barat Indonesia secara tektonik merupakan wilayah yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh subduksi/interaksi 2 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan adanya kedua lempeng tersebut membuat Sumatera Barat rawan terjadi bencana salah satunya adalah bencana gempa bumi dan tsunami. Untuk pedoman penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat telah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kemudian saat ini sedang hangat diperbincangkan dikalangan publik terkait gempa *megathrust* yang diperkirakan berkekuatan 8,9 SR yang akan melanda beberapa daerah Sumatera Barat, salah satu daerah yang memiliki potensi terjadinya fenomena *megathrust* adalah Kota Padang. Karena letak Kota Padang yang berada pada zona subduksi sehingga Kota Padang menjadi wilayah yang

memiliki sumber gempa bumi yang merusak⁵. Tidak hanya gempa bumi dan tsunami saja tetapi juga bencana alam lainnya. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan grafik indeks risiko bencana di Indonesia pada Grafik 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Indeks Resiko Bencana di Indonesia

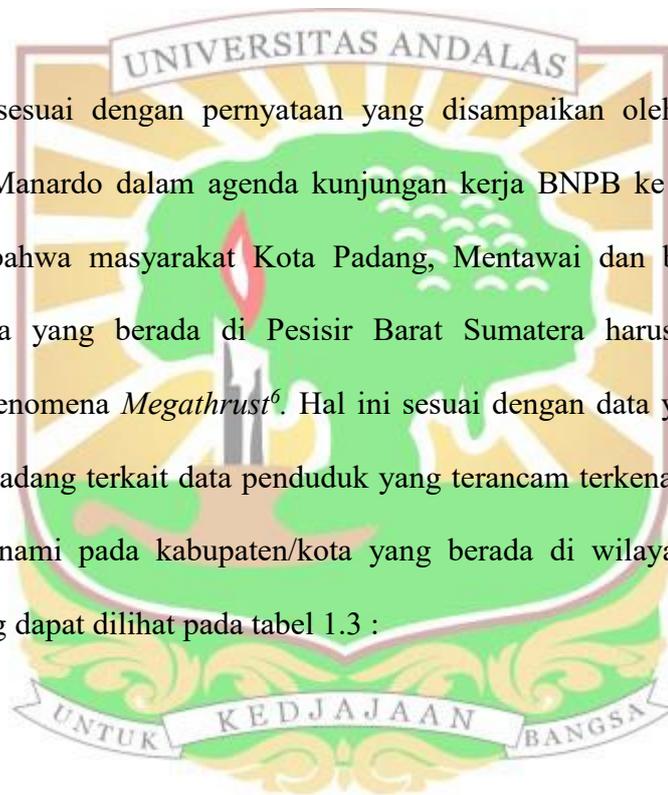


Sumber: Dokumen Data Informasi BNPB 2018 dalam
<https://www.bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi.pdf>

⁵Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) BPBD Kota Padang Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat indeks risiko bencana yang disusun oleh BNPB dari 34 provinsi terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi, salah satunya Kota Padang. Kemudian sesuai grafik tersebut juga terlihat bahwa untuk pulau Sumatera Kota Padang memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk terjadinya bencana salah satunya gempa bumi dan tsunami.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala BNPB Letjen Doni Manardo dalam agenda kunjungan kerja BNPB ke Sumatera Barat menyatakan bahwa masyarakat Kota Padang, Mentawai dan beberapa daerah kabupaten/kota yang berada di Pesisir Barat Sumatera harus bersiap untuk menghadapi fenomena *Megathrust*⁶. Hal ini sesuai dengan data yang dibuat oleh BPBD Kota Padang terkait data penduduk yang terancam terkena dampak gempa bumi dan tsunami pada kabupaten/kota yang berada di wilayah Pesisir Barat Sumatera yang dapat dilihat pada tabel 1.3 :



⁶ Faisal, Kepala BNPB minta kepala daerah untuk tingkatkan mitigasi bencana di daerah Sumbar, (<https://kabar24.bisnis.com/read/20190207/15/886180/kepala-bnpb-minta-kepala-daerah-di-sumbar-tingkatkan-mitigasi-bencana>), 2019, diakses pada 14 Maret 2019 Pukul 14.00 WIB

Tabel 1.3
Tabel Penduduk Terancam di Kab/Kota di Pesisir Barat Sumatera Tahun
2017

No	Nama Daerah	Jumlah			
		Kec	Kel/Desa/Nagari	Penduduk (Jiwa)	Penduduk (%)
1	Kab. Pesisir Selatan	15	182	245.916	43,26%
2	Kota. Padang	11	104	508.804	58,38%
3	Kab. Padang Pariaman	17	103	24.861	5,23%
4	Kota. Pariaman	4	71	25.029	27,94%
5	Kab. Agam	16	82	20.644	3,81%
6	Kab. Pasaman Barat	11	19	78.782	17,69%
7	Kab. Mentawai	10	43	17.313	16,40%

Sumber: data Pusdalops PB BPBD Prov. Sumbar Tahun 2017

Dapat dilihat bahwa dari tabel 1.3 terdapat 7 daerah kabupaten atau kota yang berada pada wilayah Pesisir Barat Sumatera yang terancam bencana gempa bumi dan tsunami terlihat bahwa Kota Padang merupakan daerah yang memiliki persentase penduduk tertinggi diantara 7 daerah kabupaten/kota yang berada dikawasan pesisir yang terancam terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, dikarenakan Kota Padang berada sepanjang garis pantai pesisir barat.

Kemudian juga hasil penelitian Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IAKI) juga menyatakan bahwa Kota Padang salah satu kota yang rawan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami⁷. Dengan tingginya dampak yang akan

⁷ Radarmalang.id, Padang Rawan Gempa Gubernur Setuju Pemindahan Ibukota Padang (<https://radarmalang.id/padang-rawan-gempa-gubernur-setuju-wacana-pemindahan-ibu-kota-sumbar/>),2018, diakses pada 14 Maret 2019 pukul 12.01 Wib

ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami maka secara keseluruhan, dalam upaya pengurangan risiko bencana maka perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dimulai dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, peningkatan infrastruktur, sarana sosialisasi dan peringatan dini serta arahan pada masyarakat perlu ditingkatkan.

Untuk penanggulangan bencana di Kota Padang telah diatur melalui Peraturan Walikota Padang No 25 Tahun 2018 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melakukan peningkatan penanggulangan bencana di Kota Padang⁸. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapsiagaan dan adanya penguatan mitigasi baik yang dilakukan pemerintah, pihak terkait maupun masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana gempa dan tsunami mengharuskan pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana serta wajib memuat mitigasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan wajib memuat beberapa aspek seperti sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana⁹.

Dengan adanya perbaikan sistem dan penguatan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai diharapkan ketika terjadi gempa *megathrust* 8,9 SR yang mengguncang Kota

⁸ Peraturan Walikota Padang No 25 Tahun 2018 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana

⁹Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Padang dan daerah pesisir lainnya yang mengakibatkan tsunami. Maka pemerintah dan masyarakat masih bisa melakukan penyelamatan diri secara mandiri dan memanfaatkan infrastruktur utama sebagai tempat berkumpul atau sebagai *shelter*¹⁰. Untuk Kota Padang terdapat 2 daerah yang berada di kawasan pesisir pantai dan memiliki pulau-pulau kecil yang berada pada zona merah terjadinya gempa bumi yang berisiko terjadinya tsunami yaitu Kecamatan Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung.

Berdasarkan dari data dokumen kajian risiko bencana (KRB) BNPB Kota Padang maka dapat dilihat indeks jumlah penduduk yang terpapar bencana alam gempa bumi per-kecamatan pada Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempa Bumi Per-Kecamatan di Kota Padang Tahun 2017

Kecamatan	Terpapar (jiwa)	Ratio Jenis Kelamin	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	INDEKS	KELAS
Bungus Teluk Kabung	22.373	105	3.302	62	66	0,866	Tinggi
Koto Tangah	166.575	99	14.430	283	365	0,866	Tinggi
Kuranji	131.474	97	12.064	180	155	0,866	Tinggi
Lubuk Begalung	108.842	100	16.013	226	236	0,866	Tinggi
Lubuk Kilangan	45.161	100	5.990	107	118	0,866	Tinggi
Nanggalo	58.496	94	3.534	98	128	0,866	Tinggi
Padang Barat	43.837	100	9.177	101	101	0,866	Tinggi
Padang Selatan	58.455	99	12.190	415	209	0,866	Tinggi
Padang Timur	78.051	96	14.296	182	81	0,866	Tinggi
Padang Utara	68.480	90	6.346	90	189	0,866	Tinggi
Pauh	60.080	100	10.965	58	176	0,866	Tinggi
KOTA PADANG	841.823	98	108.307	1.803	1.824	0,866	Tinggi

Sumber: Data KRB BNPB Kota Padang Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang berpotensi memberikan dampak kepada total jumlah penduduk terpapar

¹⁰Faisal, Op.Cit.

gempa bumi sebanyak 841.823 jiwa. Selain itu Kota Padang yang berada diwilayah Pesisir Barat Sumatera memiliki potensi terhadap ancaman bencana tsunami. Dimana beberapa daerah memiliki resiko yang tinggi untuk terparap bencana tsunami, dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut :

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1.5
Potensi Luas Bahaya Tsunami Per-Kecamatan Di Kota Padang
Tahun 2017

NO	Kecamatan	Luas Bahaya (HA)			Total	Bahaya	
		Rendah	Sedang	Tinggi		Indeks	Kelas
1	Bungus Teluk Kabung	109	507	807	1.423	0,944	Tinggi
2	Koto Tengah	271	692	2.346	3.309	0,778	Tinggi
3	Kuranji	298	307	16	621	0,476	Sedang
4	Lubuk Begalung	96	53	62	211	0,300	Rendah
5	Lubuk Kilangan	-	-	42	42	0,596	Sedang
6	Nanggalo	160	608	80	848	0,666	Sedang
7	Padang Barat	20	165	289	475	0,926	Tinggi
8	Padang Selatan	151	114	200	465	0,727	Tinggi
9	Padang Timur	141	405	34	580	0,566	Sedang
10	Padang Utara	44	287	415	747	0,905	Tinggi
11	Pauh	-	-	-	-	-	Rendah
KOTA PADANG		1.289,25	3.138,48	4.292,28	8.720,01	0,688	Tinggi

Sumber: Data KRB BNPB Kota Padang Tahun 2014-2018

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa wilayah yang rentan terparap tsunami meliputi beberapa kecamatan yang didominasi oleh kecamatan yang terletak disekitar pesisir pantai yaitu kecamatan Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung. Dan dari tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa total persentase wilayah terkena dampak tsunami sebesar 8.720,01 dengan nilai indeks bahaya

0,729 sehingga kelas dominan bahaya tsunami Kota Padang adalah tinggi. Berdasarkan data kajian dan analisa yang dibuat oleh BNPB Kota Padang maka seharusnya pemerintah sudah memaksimalkan mitigasi untuk memperkecil risiko bencana gempa bumi dan tsunami yang mengancam Kota Padang.

Kemudian berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Kota Padang memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Dari 11 kecamatan terdapat 7 kecamatan yang berpotensi terkena dampak tsunami dan kecamatan yang paling berisiko tinggi terhadap bencana ini adalah Kecamatan Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung. Karena pada Kecamatan Padang Selatan merupakan kecamatan yang memiliki banyak kelurahan serta Kecamatan Bungus Teluk Kabung termasuk kedalam wilayah titik rawan tsunami. Dengan tingginya risiko bencana gempa bumi dan tsunami pada beberapa kecamatan yang ada di Kota Padang maka diperlukan tindakan atau usaha dalam menghadapi bencana, terutama pada Kecamatan Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung melalui peningkatan mitigasi bencana.

Mitigasi bencana menurut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah salah satu cara atau tindakan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dibagi dua yaitu mitigasi yang bersifat struktural dan nonstruktural. Untuk mitigasi nonstruktural adalah metode atau upaya mengurangi

risiko dampak bencana dengan cara memberdayakan dan memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat¹¹.

Sedangkan menurut teori W.N Carter mitigasi merupakan bagian dari tahap pra bencana yang ada dalam siklus penanggulangan bencana. Pada mitigasi bencana terdapat usaha atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan tujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Carter membagi mitigasi bencana menjadi dua yaitu mitigasi struktural dan nonstruktural¹². Salah satu bentuk mitigasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat bangunan yang dimanfaatkan sebagai *shelter*. Untuk Kota Padang saat ini sudah ada beberapa bangunan yang dijadikan sebagai *Shelter* baik itu bangunan pemerintahan, perbankan dan perhotelan serta bangunan yang memang pembangunannya diperuntukan sebagai *shelter* salah satunya yang ada di Parupuk Tabing. Namun untuk beberapa daerah di Kota Padang sendiri dinilai masih mengalami kekurangan *shelter*. Hal ini dibenarkan oleh Kasubag Umum BPBD Kota Padang pada observasi awal menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini memang benar *shelter* tsunami di beberapa daerah Kota Padang jumlahnya masih terbatas. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran serta adanya keterbatasan lahan, karena untuk membangun *shelter* butuh penentuan lokasi dan kajian yang mendalam. Oleh sebab itu diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan *shelter* alami (alam) yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Seperti *shelter* alami yang ada di kawasan Bungus Teluk Kabung, Pantai Air Manis dan kawasan perbukitan yang ada di Gunung Pangilun”

¹¹Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

¹²W.N.Carter, Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook, Mandaluyong City, Manila: Asian Development Bank, 2008, Hlm 198.

(Wawancara dengan Firdaus Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pada tanggal 06 Mei 2019)

Sedangkan untuk mitigasi nonstruktural W.N Carter membaginya dalam beberapa kegiatan, beberapa diantaranya adalah pembentukan kelembagaan dengan tujuan membangun institusi atau kelompok-kelompok organisasi yang berasal dari masyarakat agar sadar bencana¹³. Sesuai dengan teori tersebut untuk saat ini Kota Padang sudah memiliki beberapa kelompok organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 229 tahun 2017 Tentang Penunjukkan Relawan Pemberi Informasi (*Roll Call*) kebencanaan di Kota Padang menetapkan bahwa personil/anggota/relawan kebencanaan lainnya siap untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam memberikan informasi mengenai kebencanaan dimasing-masing wilayah seperti kelurahan dan kecamatan. BPBD Kota Padang telah meresmikan Kelompok Siaga Bencana sebanyak 2.080 anggota dalam 104 kelurahan yang ada pada 11 kecamatan Kota Padang¹⁴.

Kegiatan mitigasi nonstruktural menurut W.N Carter selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penanggulangan bencana secara efektif karena pada kegiatan mitigasi bencana sangat dibutuhkan

¹³*Ibid*, Hlm. 199

¹⁴Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang Tahun 2014-2019

peran serta masyarakat. Untuk kesadaran masyarakat yang berada pada wilayah pesisir pantai yang ada di Kecamatan Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung terlihat bahwa mereka sebenarnya telah memahami bagaimana risiko bencana gempa bumi dan tsunami yang suatu saat dapat terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Oleh karena itu masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai memiliki sistem peringatan dini yang berasal dari kearifan lokal yang telah membudaya di kalangan masyarakat pesisir pantai yaitu dengan membaca keadaan alam.

“...kami sudah memahami resiko bencana gempa bumi yang mungkin akan berpotensi terjadi tsunami, oleh karena itu pada umumnya masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai ini telah menjalankan instruksi pemerintah untuk menyiapkan tas siaga bencana mengingat kami berada pada zona merah terjadinya tsunami.” (Hasil Wawancara dengan Yelierni masyarakat Pesisir Pantai Air Manis, pada tanggal 15 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Pesisir Pantai Air Manis telah sadar akan resiko bencana yang akan terjadi pada permukiman mereka, sehingga mereka telah melaksanakan instruksi BPBD Kota Padang dengan menyiapkan TSB (Tas Siaga Bencana). kemudian mereka juga telah memanfaatkan budaya kearifan lokal sebagai sistem peringatan dini dengan membaca keadaan alam ketika terjadi gempa.

Untuk melaksanakan mitigasi bencana yang baik tidak hanya membutuhkan kesadaran dari masyarakat itu saja, melainkan juga dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran terkait manajemen bencana misalnya dengan memahami bagaimana menerapkan langkah-langkah mitigasi yang berkembang

pada budaya lokal masyarakat¹⁵. Untuk itu dalam mewujudkannya dibutuhkan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami bagaimana manajemen bencana yang semestinya. Salah satunya dalam melakukan mitigasi bencana. Hal ini dibenarkan oleh Kasubag Umum BPBD Kota Padang pada observasi awal menyatakan bahwa:

“melakukan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana merupakan pilar yang paling penting dalam melakukan mitigasi bencana. Oleh karena itu, saat ini BPBD dengan melibatkan pihak terkait membentuk beberapa kegiatan dalam melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana secara masif terutama kepada masyarakat yang berada di kawasan pesisir pantai. Karena sejatinya bukan hanya *shelter* yang menjadi perkara utama dalam menekan kerentanan bencana gempa bumi dan tsunami.” (Wawancara dengan Firdaus Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pada tanggal 06 Mei 2019)

Karena saat ini masih rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana. Oleh sebab itu dibutuhkan metode untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut. Misalnya dengan sebuah model pendekatan yang lebih mengakar dan memberi hasil maksimal dalam pembentukan budaya mitigasi bencana di Indonesia khususnya Kota Padang. Mengingat mitigasi bencana belum dijadikan budaya lokal didalam masyarakat secara luas.

Untuk melakukan mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif oleh sebab itu mitigasi perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan teknis, pendekatan manusia, pendekatan administratif, dan pendekatan kultural (budaya)¹⁶. Kearifan lokal (*Local Wisdom*) merupakan kekayaan masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi

¹⁵W.N Carter.,Op Cit hlm 199

¹⁶Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management), PT Dian Rakyat, Jakarta, 2010, Hlm. 33.

bencana. Oleh karena itu pemerintah sebagai *leading sector* dalam melakukan mitigasi bencana dapat mempelajari bagaimana menyelamatkan diri, mencegah bencana dan mengurangi resiko atau dampak bencana melalui kearifan lokal. Kearifan lokal telah lama ada dan berkembang sebelum adanya sistem peringatan dini yang berbasis teknologi seperti saat sekarang ini.

Pendekatan budaya kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai salah satu pendekatan yang pernah sukses dalam masyarakat Aceh di Pulau Simulue dalam membaca Fenomena Alam pantai yang telah menyelamatkan ribuan masyarakat dari bencana Tsunami dan juga yang terjadi pada penduduk sekitar Gunung Kelud yang melihat tanda-tanda hewan ketika gunung Kelud akan meletus¹⁷.

Selain itu masyarakat pesisir pada umumnya memiliki cara dan kepercayaan dalam melaksanakan tradisi, dimana upacara tradisi tersebut biasanya dipandu oleh kebudayaan pesisir yang hidup secara turun temurun dikalangan mereka. Seperti di Kota Padang terdapat beberapa daerah yang memiliki tradisi upacara tolak bala yang ada pada salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan yaitu Kelurahan Pantai Air Manis dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang dilakukan setiap bulan sya'ban. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk sarana khusus untuk memohon keselamatan dari bencana tsunami dan gempa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Seksi Trantib dan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Bungus Teluk Kabung menyatakan bahwa:

¹⁷Lucky Zamzami, & Hendrawati, Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Maritim Untuk Upaya Mitigasi Bencana di Sumatera Barat, Penelitian Dosen Antropologi Unand, Padang, 2011, Hlm. 38.

“Untuk Kecamatan Bungus Teluk Kabung kami selaku aparatur pemerintahan mendukung dengan penuh setiap acara atau tradisi yang telah ada sejak dulu, salah satunya tradisi tolak bala yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tradisi itu ditujukan agar masyarakat khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung kembali kepada *falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, serta kami selaku perwakilan masyarakat percaya bahwa melalui tradisi ini Bungus Teluk Kabung dapat terbebas dari semua bala yang mengancam seperti bencana gempa dan tsunami” (Wawancara dengan Rustam Kasi Kesejahteraan dan Penanggulangan Bencana pada tanggal 02 Juli 2019)

Untuk Kecamatan Bungus Teluk Kabung tradisi tolak bala tersebut melibatkan alim ulama seperti syekh yang ada di kecamatan tersebut kemudian juga melibatkan aparatur pemerintahan tingkat kecamatan, Walikota Padang Mahyeldi, TPQ / MDA per-kecamatan, remaja mesjid, dan majelis ta’lim. Untuk rangkaian acara dari tolak bala ini diawali dengan pawai bersama, kemudian melakukan dzikir bersama menjelang magrib kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat magrib berjamaah dan ditutup dengan doa bersama ala tharekat.

Tidak berbeda jauh dengan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Padang Selatan juga memiliki prosesi tolak bala salah satunya yang ada di Kelurahan Pantai Air Manis. Dimana kelurahan tersebut memiliki upacara tradisional yang biasa disebut dengan *Raba’akia* yang biasanya dilakukan dipinggir pantai air manis dan diikuti oleh beberapa tokoh adat, masyarakat dan pemerintahan seperti Kepala Dinas Pariwisata.

Untuk Kota Padang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat juga telah diterapkan atau dimanfaatkan oleh BPBD Kota Padang selaku *leading sector* dalam melakukan pencegahan dan

penanggulangan bencana untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Kota Padang baik itu untuk bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Hal ini dibenarkan oleh Firdaus selaku Kasubag Umum BPBD Kota Padang pada observasi awal menyatakan bahwa:

“Metode kearifan lokal masyarakat merupakan metode yang paling penting serta diutamakan dalam melakukan mitigasi baik itu mitigasi bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan banjir. karena mitigasi berbasis kearifan lokal diharapkan mampu memberikan sistem peringatan dini kepada masyarakat ketika suatu bencana akan terjadi, mengingat adanya keterbatasan BPBD Kota Padang dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadinya sebuah musibah. Oleh karena itu mitigasi berbasis kearifan lokal perlu ditonjolkan dalam melakukan mitigasi bencana” (Wawancara dengan Firdaus Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pada tanggal 06 Mei 2019)

Dalam menerapkan mitigasi berbasis kearifan lokal masyarakat tentu dibutuhkan pemahaman terlebih dahulu terkait bencana gempa bumi dan tsunami kemudian cara atau langkah seperti apa yang perlu dilakukan ketika terjadi gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, untuk melakukan itu semua dibutuhkan kerjasama oleh setiap *stakeholder* yang terlibat karena tidak mungkin dalam penerapan kegiatan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah saja atau perseorangan. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kasubag Umum BPBD Kota Padang Firdaus bahwa:

“ melakukan mitigasi terkait bencana gempa bumi dan tsunami telah dilakukan kegiatan berupa sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mitigasi serta pemahaman terkait tindakan seperti apa yang perlu dilakukan ketika bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami terjadi di Kota padang baik itu di lingkungan masyarakat maupun ditingkat pendidikan. Dan pemahaman pentingnya mitigasi berbasis kearifan lokal masyarakat juga telah disosialisasikan melalui kelompok-kelompok yang berasal dari masyarakat. Seperti KSB

(Kelompok Siaga Bencana) baik itu ditingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan. Kemudian juga dibentuk LSM seperti KOGAMI (Komunitas Siaga Tsunami). Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki BPBD Kota Padang untuk menjangkau masyarakat secara langsung”(Wawancara dengan Firdaus Kasubag Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang pada tanggal 06 Mei 2019 pukul 10.30 WIB.)

Sebenarnya mitigasi bencana dengan memanfaatkan kearifan lokal ini telah lama ada dan digunakan oleh masyarakat minang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh:

Zulfadrim, Y Toyoda dan H kanegae yang berjudul *“The implementation Of Local Wisdom In Reducing Natural Disaster Risk: A Case Study Form West Sumatera”*¹⁸. Yang menyebutkan bahwa *Communities in urban and rural area in Minangkabau have developed ways to prevent or to reduce disaster risk by adaptation and well preparation. Their ancestor has experienced recurrent of hydro meteorological disaster and utilize their knowledge to deal with them. The most interesting features about Minangkabau communities are their traditional house. Most people know about traditional house of West Sumatra, which has a unique triangular roof. This traditional house called Rumah Gadang (Big House) because of its function as the main venue for several activities, it is also a place for clan meeting and marriages. This house built on stilts with high ground space to protect them from flood, animal attack and moisture, sometimes it is also being used as a place to keep their cattle stock. This traditional house also has an ability to withstand an earthquake, since the column of this building is normally laid an stone pedestal foundation rather than inserted into the soili*

Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka memiliki arti bahwa Masyarakat didaerah perkotaan dan pedesaan di Minangkabau telah mengembangkan cara untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana dengan adaptasi dan persiapan yang baik. Nenek moyang mereka telah berulang kali mengalami bencana *hydrometeorologi* sehingga membuat masyarakat

¹⁸ Zulfadrim, Y, Toyoda @H.Kanegae, The implimentation Of Local Wisdom In Reducing Natural Disaster Risk: A Case Study Form West Sumatera, Osaka Jepang, 2018

Minangkabau memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk menghadapi bencana.

Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya mitigasi bencana berbasis kearifan lokal telah lama diterapkan oleh masyarakat minang, terlihat dari bagaimana nenek moyang masyarakat minang dalam membangun rumah gadang yang dilengkapi dengan rangkiang yang bertujuan untuk menyimpan bahan makanan dan ternak mereka sebagai suatu tindakan untuk menyiapkan diri ketika bencana terjadi.

Kemudian melalui hasil observasi yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa pada umumnya masyarakat yang berada di kawasan pesisir pantai seperti salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan yaitu Kelurahan Pantai Air Manis dan 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Selatan memiliki sistem peringatan dini dengan memanfaatkan toa masjid atau “surau” yang ada pada lingkungan tempat tinggal mereka. Dimana ketika bencana gempa bumi berlangsung lama dan kencang maka penjaga mesjid atau yang dikenal dengan sebutan “garin masjid” akan memberikan instruksi kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi pada bukit-bukit yang ada pada kedua daerah tersebut.

Dengan adanya sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal tersebut dianggap mampu memberikan keuntungan dalam meningkatkan kegiatan untuk pengurangan resiko yang akan ditimbulkan oleh bencana, seperti yang diketahui bahwa adanya keterbatasan pemerintah dalam menyiapkan dan menyediakan sistem peringatan yang mudah diakses oleh masyarakat dan mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Hanya saja untuk menjadikan penjaga masjid sebagai aktor yang akan memberikan informasi terkait bencana dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang baik terkait kebencanaan, misalnya dapat dilakukan dengan memberikan peluang untuk mereka terlibat pada kegiatan kebencanaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Namun hingga tahun 2019 terlihat hal tersebut sama sekali belum dilakukan

Dengan melakukan mitigasi berbasis kearifan lokal berarti pemerintah menempatkan masyarakat dan kelompok masyarakat sebagai pelaku utama dalam melakukan penanggulangan bencana. Menurut Wiwik Ratna Kusumasari Manajemen bencana berbasis komunitas dapat terealisasi apabila ada tokoh penggerak, konsep yang jelas, dan bahasa komunikasi kerakyatan yang tepat berbasis kearifan budaya setempat dan jaringan informasi yang mudah diakses setiap saat¹⁹.

Pada penelitian ini yang aktor yang melakukan kegiatan mitigasi berbasis kearifan lokal adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari tokoh adat seperti lembaga KAN dan *niniak mamak*, tokoh agama, dan KSB perkecamatan dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan pihak BPBD yang berasal dari kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mitigasi bencana yang berbasis kearifan lokal masyarakat. Mengingat bahwa untuk masyarakat kawasan pesisir pantai Bungus Teluk Kabung dan kawasan Pesisir Pantai Air manis Padang yang merupakan daerah yang memiliki risiko

¹⁹Roni Ekha, Op.Cit., Hlm.74

tinggi untuk terjadinya gempa bumi yang merusak dan berpotensi terjadinya tsunami maka dibutuhkan sebuah mitigasi bencana dengan memanfaatkan metode kearifan lokal yang berkembang didalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala BNPB yang saat ini gencar mengintegrasikan kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Untuk itu Kota Padang sebagai salah satu kota yang memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak besar terhadap gempa bumi yang berpotensi tsunami. Maka mitigasi berbasis kearifan lokal masyarakat diperlukan pada 2 daerah yang berada dipesisir pantai di Kota Padang yaitu Kelurahan Pantai Air Manis dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagai sistem peringatan dini.

Mengingat sebenarnya masyarakat kedua wilayah tersebut telah memiliki kesadaran akan manajemen bencana hanya saja untuk menerapkan mitigasi bencana yang baik dibutuhkan pelatihan dan pendidikan bagaimana penerapan mitigasi bencana yang semestinya. Selain itu Bungus Teluk Kabung dan Kelurahan Pantai Air Manis yang berada di Kecamatan Padang Selatan juga terletak pada lereng bukit yang memiliki keuntungan karena adanya keberadaan perbukitan sepanjang daerah Bungus Teluk Kabung dan Kelurahan Pantai Air Manis yang membuat kedua daerah tersebut memiliki *Shelter* alami yang dapat dijadikan sebagai TES (Tempat Evakuasi Sementara) bagi masyarakat apabila terjadi bencana tsunami.

Untuk Kota Padang *shelter* alam ini hanya ada pada kedua daerah tersebut dan didukung oleh jalur evakuasi yang pendek. Artinya jalur menuju *shelter* sangatlah dekat sehingga diperkirakan tingkat keselamatan masyarakat apabila

terjadi bencana tsunami relatif tinggi jika masyarakat mampu melakukan evakuasi secara mandiri ke daerah yang tersebut.

Oleh karena itu pada kedua daerah tersebut memungkinkan untuk menggunakan metode mitigasi berbasis kearifan lokal sebagai upaya penyelamatan diri dengan memanfaatkan infrastruktur alam. Sesuai dengan himbuan kepala BNPB kepada masyarakat Mentawai pada beberapa waktu lalu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa daerah pesisir Kota Padang juga menerapkan metode mitigasi bencana berbasis kearifan lokal sebagai sistem peringatan dini dan upaya penyelamatan diri dengan memanfaatkan infrastruktur alam salah satunya kawasan Bungus Teluk Kabung dan Pantai Air Manis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang tersebut, maka persoalan yang akan diteliti adalah Bagaimana Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan dan proses Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kajian yang lebih khusus mengenai Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Padang

Memberikan sumbangan penelitian dalam rangka menjabarkan secara detail Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Kota Padang.

b. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Kota Padang.

c. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi mengenai Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Kota Padang.



